



WALI KOTA BANJARMASIN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 53 TAHUN 2021

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR 19 TAHUN 2021  
TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN  
INSPEKTORAT KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka diperlukan adanya suatu pengawasan serta pengendalian terhadap penyelenggaraan pemerintahan di maksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan dengan baik dan optimal, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2021 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kota Banjarmasin Tahun 2021, yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 385);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
19. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);
20. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 44 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 44);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Merubah Lampiran Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 19 Tahun 2021 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Wali Kota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di Banjarmasin  
Pada tanggal 8 Oktober 2021

WALI KOTA BANJARMASIN,

  
IBNU SINA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 39 TAHUN 2021  
TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

**DAFTAR PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT)  
TAHUN 2021**

WILAYAH	BULAN															
	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER				
IRBAN I	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan, Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penerimaan Pendapatan Jembatan Pulau Bromo	Reviu Laporan Keuangan SKPD	Workshop Pengelolaan Dana BOS APBN SD Tahun 2021	Reguler Dinas Perhubungan	Reguler Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	ATT pada Bidang PAUD dan Pendidikan Formal Tahun Anggaran 2020	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Zona Integritas terkait usul penilaian WBK dan WBBM	Reviu DAK	Probity Audit	Reviu RPJMD	Reviu DAK	Reviu Renstra				
		Audit Kinerja Program Pemenuhan Hak Anak		Reguler Dinas Pendidikan		Reviu Rancangan Akhir RKPD	Reviu HPS pada 10 Proyek Strategis Pemerintah Kota Banjarmasin	Reviu Renja Perubahan								
	Asistensi Dana Penanggulangan Bencana	Asistensi Dana Penanggulangan Bencana		Evaluasi LAKIP		Reviu Belanja Tidak Terduga pada Dinas PUPR	Audit Belanja Tidak Terduga	Verifikasi dan Validasi Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI					Reviu DAK	Reviu RKA Perubahan	Reviu RKA SKPD TA 2022	Penutupan Kas Akhir Tahun 2021
						Reviu DAK	Reviu DAK	Reviu DAK					Reviu RKPDP Perubahan			
IRBAN II	Stock opname persediaan SKPD	Reviu Laporan Keuangan SKPD T.A 2020	Evaluasi LAKIP SKPD Tahun 2020	Reviu Kinerja Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan	Reviu Usulan RKA Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Reguler Kecamatan Banjarmasin Selatan	Audit Kinerja Bidang Perindustrian Tahun 2020	Reviu Rancangan Akhir Renja SKPD Tahun 2022	Reviu RKA SKPD 2022	ATT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	ATT Satuan Polisi Pamong Praja	ATT Kecamatan Banjarmasin Barat				
		ATT Dana Kelurahan Kecamatan Banjarmasin Utara	Reguler Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Reviu atas Promosi, Rotasi dan Mutasi		ATT Pengadaan Barang dan Jasa T.A 2020-2021		Monev ZI Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK/WBBM)	Reviu Rancangan Akhir Renja Perubahan SKPD Tahun 2021	Reviu RKA Perubahan SKPD 2021	ATT Kecamatan Banjarmasin Timur	ATT Damkar	Penutupan Kas Akhir Tahun 2021			

WILAYAH	BULAN														
	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER			
IRBAN III	Stock Opname Barang Persediaan di 26 Puskesmas, RSUD, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Sosial dan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Reviu Laporan Keuangan SKPD TA 2020	Evaluasi SAKIP SKPD Tahun 2020	Monev Vaksinasi dan Alat Rapid Test Antigen	Reviu SSH 2021	Reguler Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik	Reviu Daftar Kontrak DAK Dinas Kesehatan & RS Sultan Suriansyah	Reviu Daftar Kontrak DAK Dinas Kesehatan & RS Sultan Suriansyah	Reviu KUA PPAS TA 2022	Reviu Daftar BAST DAK Dinas Kesehatan dan RS Sultan Suriansyah	Reviu RKA SKPD TA 2022	Monitoring Penganggaran Almatkes pada Dinas Kesehatan	Audit Vaksinasi Tahap IV		
						Reviu Perubahan Penyusunan Rencana Kegiatan DAK Non Fisik BOK Puskesmas dan BOK Kab/Kota			Reviu SP2D DAK Dinas Kesehatan	Reviu DAK					
						Reviu Daftar Kontrak DAK DLH			Reviu Daftar BAST DAK DLH		Probitas Audit Tahap Pelaksanaan Puskesmas Sungai Andai				
						Reviu Daftar Kontrak DAK Dinas Kesehatan			Reviu Daftar BAST DAK Dinas Kesehatan	Audit Vaksinasi Tahap III		Audit PBJ Almatkes pada Dinas Kesehatan			
									Reviu Daftar Kontrak DAK Dinas Kesehatan & RS Sultan Suriansyah		Reviu KUPA PPAS Perubahan TA 2021			Audit Stock Vaksin Covid-19	Probitas Audit Tahap Pelaksanaan Puskesmas Pemurus Baru
						Audit Vaksinasi Termin 1 Tahap I			Reviu Laporan Keuangan Pemko TA 2020	Reviu BTT Dinas Kesehatan	Audit Vaksinasi Tahap II	Reviu Daftar Kontrak DAK Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		Monev ZI menuju WBK/WBBM	Reviu Ranhir Renja SKPD Tahun 2022
		Reviu Daftar Kontrak DAK DLH	Reviu Daftar BAST DAK DLH	Reviu DAK											
		Monev ZI menuju WBK/WBBM	Reviu Ranhir Renja SKPD Tahun 2022		Reviu Daftar Kontrak DAK Dinas Kesehatan & RS Sultan Suriansyah		Reviu DAK								
				Reviu Daftar BAST DAK DLH	Reviu Daftar BAST DAK Dinas Kesehatan			Reviu DAK							

WILAYAH	BULAN												
	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER	
IRBANSUS	Pemeriksaan Penanganan Pengaduan Masyarakat												
	Pemeriksaan khusus temuan pemeriksaan reguler tahun anggaran 2020 pada Bagian protokol dan Komunikasi Pimpinan Setdako Banjarmasin	Reviu Laporan Keuangan Setda Kota Banjarmasin Tahun 2020	reviu laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020										
		Pemeriksaan dengan tujuan Tertentu Pengadaan Belanja modal (Pengadaan Barang) dan Penatausahaannya TA. 2020 pada Bagian Umum Setdako Banjarmasin	Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2020 pada Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin										
		Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah kota Banjarmasin											
SEKRETARIAT	Monitoring												

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA